

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga hari ini memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia tanpa terkecuali dalam dunia bisnis. Perkembangan yang terjadi menimbulkan kompetisi yang ketat diantara perusahaan. Ketatnya kompetisi ini menuntut setiap perusahaan untuk dapat menciptakan suatu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Perusahaan lain guna mempertahankan kelangsungan hidup usahanya (*going concern*). *Going concern* merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas dimana jika suatu entitas mengalami kondisi yang sebaliknya, entitas tersebut menjadi bermasalah (Sugiharto *et al.*, 2022)

Keberadaan *going concern* sangat vital bagi perkembangan suatu perusahaan, sebab *going concern* menjadi sebuah acuan bagi pihak eksternal perusahaan seperti kreditur dan investor atas pengambilan keputusan investasi. Pihak eksternal akan melihat sekaligus mempertimbangkan status *going concern* yang dimiliki perusahaan apakah perusahaan tersebut dapat bertahan dikemudian hari. Selain dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masif yang menciptakan persaingan ketat dalam bisnis, keberlangsungan hidup perusahaan yang ada saat ini dipengaruhi oleh pandemi virus covid-19. Pandemi yang berlangsung hingga saat ini memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, salah satunya adalah sektor ekonomi. Krisis yang terjadi saat ini membuat kondisi keuangan perusahaan tidak stabil karena banyak aspek yang

tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pelaporan catatan atas laporan keuangan (CALK),

Perusahaan wajib mengungkapkan bagaimana menjalankan bisnis mereka selama pandemi. Dari hal ini, secara tidak langsung mempengaruhi proses audit khususnya pada *going concern* (Santoso *et al.*, 2021).

Opini *audit going concern* merupakan penilaian auditor tentang kemampuan perusahaan untuk melanjutkan operasinya dalam waktu dekat tanpa adanya kebangkrutan atau likuidasi. Opini ini sangat penting karena memberikan sinyal kepada pemangku kepentingan mengenai stabilitas dan kesehatan finansial perusahaan. Pada sektor pertambangan, opini audit *going concern* menjadi lebih relevan mengingat industri ini rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, regulasi pemerintah, serta isu lingkungan yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *pengaruh financial distress, debt default, dan audit delay* terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.

Financial distress merujuk pada kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang serius dan berpotensi menuju kebangkrutan. Beberapa indikator *financial distress* meliputi penurunan profitabilitas, peningkatan hutang, dan likuiditas yang rendah. Dalam konteks sektor pertambangan, *financial distress* seringkali terjadi akibat penurunan harga komoditas, tingginya biaya operasional, dan perubahan regulasi lingkungan yang memerlukan investasi tambahan. Data terbaru menunjukkan bahwa beberapa perusahaan tambang di Indonesia mengalami *financial distress* akibat penurunan harga batubara dan logam pada periode 2019-2022. Misalnya, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mengalami penurunan rasio likuiditas dari 1.10 pada 2019 menjadi 0.91 pada 2022, dan penurunan *return on assets* dari 5.8% pada 2019 menjadi 3.2% pada 2022. Hal ini berdampak pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban

finansialnya dan meningkatkan risiko mendapatkan opini audit *going concern* yang negatif.

Kasus *financial distress* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI dapat dilihat dari beberapa contoh konkret. PT Vale Indonesia Tbk (INCO), misalnya, mengalami penurunan profitabilitas yang signifikan selama periode tersebut. Rasio profitabilitas mereka turun dari 7.0% pada 2019 menjadi 4.8% pada 2022. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh fluktuasi harga nikel yang merupakan produk utama perusahaan, serta peningkatan biaya operasional terkait dengan investasi pada teknologi ramah lingkungan dan perawatan infrastruktur tambang yang semakin mahal (Yulia, 2020).

PT Timah Tbk (TINS) juga menghadapi *financial distress* yang serius selama periode yang sama. Pada 2020, rasio likuiditas perusahaan turun drastis menjadi 0.85 dari 1.15 pada tahun sebelumnya, menandakan penurunan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kondisi ini diperburuk oleh penurunan harga timah di pasar global dan peningkatan biaya eksplorasi serta produksi akibat regulasi lingkungan yang lebih ketat (Sari, 2021).

PT Bumi Resources Tbk (BUMI), yang dikenal sebagai salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia, juga tidak luput dari *financial distress*. Pada 2021, rasio *leverage* perusahaan meningkat tajam menjadi 1.2 dari 0.9 pada tahun 2019, menunjukkan peningkatan ketergantungan perusahaan pada pembiayaan eksternal. Penurunan harga batubara dan permintaan global yang lemah karena pandemi COVID-19 memperburuk kondisi keuangan perusahaan, menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban hutang dan operasional (Hidayat, 2021).

Selain itu, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mengalami penurunan kinerja keuangan yang signifikan. Meskipun perusahaan berusaha diversifikasi produk

melalui eksplorasi logam mulia dan bahan tambang lainnya, penurunan harga komoditas utama seperti nikel dan emas selama pandemi mempengaruhi rasio profitabilitas perusahaan. Pada 2022, rasio *return on assets* (ROA) ANTM turun menjadi 3.2% dari 5.8% pada 2019, menandakan penurunan efisiensi penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan laba (Putri, 2022).

Debt default terjadi ketika perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. *Debt default* dapat memberikan dampak signifikan terhadap opini audit *going concern* karena mencerminkan ketidakmampuan perusahaan untuk mengelola likuiditas dan solvabilitasnya. Perusahaan yang mengalami *debt default* seringkali kesulitan mendapatkan pembiayaan baru dan menghadapi tekanan likuiditas yang lebih besar. Di sektor pertambangan, *debt default* dapat terjadi akibat volatilitas pendapatan yang disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas dan tingginya biaya eksplorasi serta produksi. Data dari BEI menunjukkan bahwa PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengalami *debt default* sebesar Rp 500 miliar pada 2019 yang meningkat menjadi Rp 800 miliar pada 2022. Kondisi ini mempengaruhi persepsi auditor terhadap kelangsungan usaha perusahaan tersebut.

Kasus *debt default* yang dialami oleh perusahaan sektor pertambangan di Indonesia juga cukup mencolok. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menghadapi masalah *debt default* yang parah selama periode 2019-2022. Pada 2019, perusahaan mengalami *default* sebesar Rp 500 miliar yang terus meningkat hingga Rp 800 miliar pada 2022. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar hutangnya ini disebabkan oleh penurunan harga batubara global dan tingginya biaya operasional, serta ketergantungan yang tinggi pada hutang untuk pembiayaan ekspansi (Wardani, 2022).

PT Timah Tbk (TINS) juga mengalami *debt default* yang signifikan pada 2020, dengan total hutang yang gagal dibayar sebesar Rp 150 miliar. Peningkatan regulasi dan biaya operasional serta fluktuasi harga timah di pasar global menjadi penyebab utama dari masalah ini. Pada 2021, jumlah *default* meningkat menjadi Rp 200 miliar, menunjukkan ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola hutangnya dengan baik (Aulia, 2021).

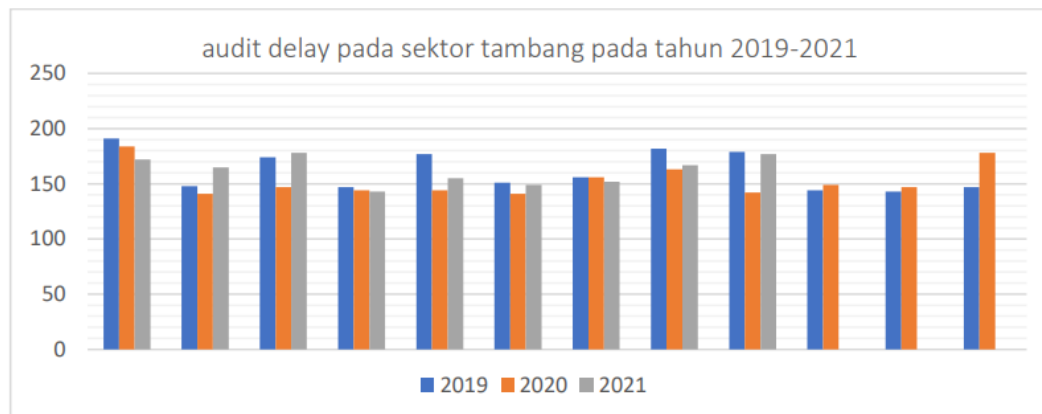
PT Adaro Energy Tbk (ADRO) yang merupakan salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia juga tidak luput dari masalah *debt default*. Pada 2020, perusahaan mengalami *debt default* sebesar Rp 100 miliar, dan meningkat menjadi Rp 150 miliar pada 2021. Penurunan permintaan batubara selama pandemi dan tingginya biaya eksplorasi serta produksi menjadi faktor utama yang menyebabkan perusahaan kesulitan dalam memenuhi kewajiban hutangnya (Ramdani, 2021).

Selain itu, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) juga mengalami tekanan keuangan yang mengakibatkan *debt default*. Meskipun ANTM berusaha melakukan diversifikasi produk tambang, namun ketidakstabilan harga komoditas seperti nikel dan emas serta peningkatan biaya operasional dan eksplorasi menyebabkan perusahaan gagal memenuhi beberapa kewajiban hutang pada 2021. Hal ini berdampak pada persepsi kreditur dan investor terhadap kemampuan ANTM untuk menjaga kelangsungan usahanya (Puspita, 2022).

Audit delay merupakan lamanya waktu penyelesaian audit dari tanggal tutup buku perusahaan hingga tanggal dikeluarkannya laporan audit (Sari, 2021). Semakin lama menunda penyampaian laporan keuangan maka semakin diragukan relevansi atas laporan keuangan tersebut. Dimana suatu perusahaan diuntut menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, serta dapat di bandingkan dengan indikator yang sama. Keterlambatan publikasi laporan

keuangan mengidentifikasi adanya persoalan pada laporan keuangan tersebut (yanasari *et al.*, 2021).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 14/POJK.04/2022, perusahaan go public diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan mereka dalam jangka waktu maksimal 120 hari atau paling lambat pada akhir bulan keempat setelah penutupan tahun buku perusahaan. OJK telah menetapkan sanksi administratif bagi perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan, sebagaimana tercantum di laman resmi ojk.go.id. Jenis sanksi yang diberlakukan tergantung pada tingkat pelanggaran, yang dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga sanksi terberat berupa pencabutan izin pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).



Gambar 1.1

Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan peraturan dan sanksi terkait keterlambatan pelaporan keuangan, masih ada sejumlah perusahaan yang belum disiplin dalam memenuhi kewajiban tersebut. Berdasarkan informasi dari investor.id (11 Januari 2022), banyak emiten yang masih melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

Pada tahun 2019, terdapat 12 perusahaan di sektor pertambangan yang mengalami keterlambatan pelaporan, dengan PT. Ratu Prabu Energi Tbk menjadi yang paling lambat, yakni mencapai 191 hari. Sementara itu, di tahun 2020, jumlah perusahaan yang mengalami keterlambatan tetap 12, dengan PT. Borneo Olah Sarana Sukses Tbk mencatat keterlambatan terpanjang hingga 184 hari. Pada tahun 2021, jumlah entitas yang mengalami *audit delay* berkurang menjadi 9 perusahaan, dengan PT. Ginting Jaya Energi Tbk sebagai yang paling lambat, yaitu 178 hari. Meskipun ada tren perbaikan dari segi jumlah perusahaan yang terlambat, kesadaran beberapa emiten dalam menerbitkan laporan keuangan dinilai masih rendah. Setiap tahunnya, keterlambatan pelaporan masih ditemukan dan sering kali melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh OJK.

Beberapa penelitian yang relevan dengan variabel *financial distress* pada penelitian ini meliputi : (1) (Mar & Faradisa, 2024) ; (2) (Putri & Astuti, 2023) ; (3) (Divira & Darya, 2023). (Mar & Faradisa, 2024) melakukan penelitian tentang terhadap *financial distress* dan pengaruhnya terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan perdagangan retail . Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit *going concern* . Hasil berbeda ditemukan pada penelitian (Putri & Astuti, 2023) yang meneliti pengaruh *financial distress* terhadap opini audit *going concern* . Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*. Kemudian , hasil penelitian dari (Divira & Darya, 2023) menyimpulkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*.

Beberapa penelitian yang relevan dengan variabel *debt default* pada penelitian ini meliputi : (1) (Febrianti & Suhartini, 2022) ; (2) (Idawati, 2023) ; (3) Kharisma Putri Utami *et al.* 2022. (Febrianti & Suhartini, 2022) melakukan

penelitian tentang *debt default* dan pengaruhnya terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa *debt default* berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*. Hasil yang ditemukan pada penelitian (Idawati, 2023) yang meneliti pengaruh *debt default* terhadap opini audit *going concern* bahwa *debt default* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit *going concern*. Kemudian, hasil penelitian dari (Divira & Darya, 2023) menyimpulkan bahwa *debt default* berpengaruh positif dan signifikan terhadap opini audit *going concern*.

Beberapa penelitian yang relevan dengan variabel *audit delay* pada penelitian ini meliputi : (1) (Afifah & Hernawati, 2024) (2) (Auladi *et al.*, 2019) (3) (Mar & Faradisa, 2024). (Afifah & Hernawati, 2024) melakukan penelitian tentang *audit delay* dan pengaruhnya terhadap opini audit *going concern*. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa *audit delay* berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*. Hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian (Auladi *et al.*, 2019) yang meneliti pengaruh *audit delay* terhadap opini audit *going concern* bahwa *audit delay* berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*. Kemudian, hasil penelitian dari (Mar & Faradisa, 2024) menyimpulkan bahwa *audit delay* signifikan terhadap opini audit *going concern*

Penelitian ini akan fokus pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2023. Sektor pertambangan dipilih karena kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan karakteristiknya yang unik, seperti ketergantungan pada harga komoditas global dan regulasi lingkungan yang ketat. Selama periode tersebut, sektor pertambangan di Indonesia mengalami berbagai tantangan, termasuk penurunan harga komoditas, perubahan regulasi, dan tekanan lingkungan yang semakin meningkat. Data dari BEI menunjukkan bahwa beberapa perusahaan tambang

menghadapi kondisi *financial distress*, *debt default*, dan audit *delay* yang signifikan, yang dapat mempengaruhi opini audit *going concern* mereka.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *financial distress*, *debt default*, dan audit *delay* terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit *going concern* dan memberikan rekomendasi bagi perusahaan, auditor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Penelitian ini mereplikasi penelitian (Mar & Faradisa, 2024) yang menggunakan variabel dependen berupa *disclosure*, *debt default*, *financial distress* dan audit *delay* menggunakan variabel independen berupa opini audit *going concern* pada perusahaan perdagangan retail yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022. Hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut beserta penelitian terdahulu yang menggunakan variabel *disclosure* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit *going concern*. Oleh karenanya, penelitian ini akan berfokus melihat bagaimana pengaruh *financial distress*, *debt default* dan audit *delay* terhadap opini audit *going concern* pada perusahaan pertambangan berbagai sektor yang terdaftar di BEI dengan rentang waktu 2019-2023 .

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam bidang akuntansi dan auditing. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit *going concern*, khususnya di sektor pertambangan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen perusahaan tambang untuk meningkatkan kinerja keuangan dan operasional guna mengurangi risiko *financial distress* dan

debt default. Selain itu, auditor dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai referensi dalam melakukan evaluasi terhadap kelangsungan usaha perusahaan tambang. Pemangku kepentingan lainnya, seperti investor dan regulator, juga dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk membuat keputusan yang lebih informasional terkait investasi dan regulasi di sektor pertambangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks dan latar belakang dari penelitian ini, maka peneliti merumuskan dan mengajukan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*?
2. Apakah *debt default* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*?
3. Apakah audit *delay* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*?
4. Apakah *financial distress*, *debt default*, dan audit *delay* secara simultan berpengaruh terhadap opini audit *going concern*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk menguji pengaruh dari *financial distress* terhadap opini audit *going concern*.
2. Untuk menguji pengaruh dari *debt default* terhadap opini audit *going concern*.
3. Untuk menguji pengaruh dari *audit delay* terhadap opini audit *going concern*.
4. Untuk menguji pengaruh dari *financial distress*, *debt default*, dan audit *delay* secara simultan terhadap opini audit *going concern*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang kemudian dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk kontribusi serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya untuk bidang opini audit *going concern* serta menjadi referensi bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan praktis. Penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan, meningkatkan pengetahuan, serta memperdalam pemahaman bagi praktisi di bidang akuntansi dan bidang audit dan keuangan.

1.5 Ruang Lingkup

Perusahaan-perusahaan sektor industri sub sektor pertambangan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023 menjadi fokus penelitian ini. Batasan aspek pada penelitian ini adalah opini audit *going concern* dan faktor-faktor pengaruhnya dibatasi meliputi *financial distress* yang akan diukur dengan menggunakan model *zmijewski*, *debt default* yang akan diukur dengan perhitungan *dummy*, dan audit *delay* yang akan diukur dengan perhitungan *dummy* juga.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian terbagi menjadi lima bab mengikuti pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012). Lima bab tersebut terbagi menjadi sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang berdasarkan pada latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai pendukung penelitian beserta dengan penelitian terdahulu, beserta dengan kerangka konseptual; kerangka model berpikir; dan perumusan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN.

Bab ini membahas rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, variabel dan definisi operasional penelitian, serta metode analisis penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN.

Bab ini diberikan gambaran terkait data yang digunakan untuk penelitian, pengolahan deskripsi data menggunakan teknik statistik deskriptif, pengujian atas hipotesis, serta pembahasan.

BAB V PENUTUP.

Bab ini berisi kesimpulan pembahasan hasil penelitian, saran, dan keterbatasan dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) mengartikan relasi keagenan sebagai perjanjian dimana satu atau lebih individu dengan kepentingan tertentu (*principal*) memberikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) untuk mengeksekusi tugas tertentu atas namanya, termasuk memberikan otoritas kepada agen untuk mengambil keputusan. Poin kunci dalam teori keagenan adalah delegasi kekuasaan kepada agen untuk bertindak atas nama *principal*. Teori ini memberikan konsep penting dalam menjelaskan konflik kepentingan antara manajer dan pemilik sebagai hambatan utama. Teori keagenan didasarkan pada beberapa asumsi, termasuk:

1. Rasionalitas, dengan asumsi bahwa baik prinsipal maupun agen bertindak secara rasional, memperhatikan kepentingan pribadinya sendiri.
2. Asimetri informasi, dengan asumsi bahwa informasi menciptakan ketidakseimbangan pengetahuan antara agen dan pemilik, dimana agen mempunyai akses lebih terhadap informasi tentang tindakan dan kemampuannya sendiri.
3. Konflik tujuan yang timbul karena agen maupun prinsipal mempunyai perbedaan tujuan yang dapat memunculkan konflik kepentingan.
4. Bahaya moral, yakni terjadi ketika agen memanfaatkan ketidakseimbangan informasi untuk kepentingan pribadinya daripada kepentingan prinsipal.
5. Seleksi yang merugikan mengacu pada kesulitan prinsipal dalam memilih agen yang memiliki keterampilan, kemampuan, dan motivasi yang diinginkan.

6. Kontrak yang tidak lengkap sehingga menyulitkan merumuskan kontrak yang mencakup semua kemungkinan dan hasil yang mungkin terjadi, sehingga meninggalkan potensi masalah dalam hubungan keagenan.

Teori agensi menguraikan relasi yang kompleks antara agen dengan prinsipal dengan fokus utama pada konflik kepentingan di antara keduanya. Dalam konteks ini, agen sering kali cenderung melakukan tindakan untuk kepentingan pribadinya yang sering kali tidak selaras dengan kepentingan prinsipal. Dalam kerangka teori ini, kepentingan yang berbeda antara agen dengan prinsipal dan asimetri informasi antara kedua pihak tersebut menjadi asumsi dasar. Oleh karena itu, prinsipal harus merancang sistem insentif yang sesuai guna mengatur tindakan agen agar sesuai dengan kepentingannya. Teori agensi memiliki keterkaitan yang penting dengan bidang akuntansi karena membuka wawasan tentang desain dan implementasi sistem akuntansi dalam konteks hubungan prinsipal-agen. Akuntansi memegang peran sentral dalam penyelesaian masalah agensi dan memfasilitasi keselarasan antara kepentingan prinsipal dan agen.

Informasi akuntansi berperan penting dalam memonitor dan mengendalikan aktivitas agen dalam konteks hubungan prinsipal-agen. Prinsipal menggunakan informasi keuangan dan non-keuangan yang disediakan oleh agen untuk mengevaluasi kinerjanya dan memastikan bahwa tindakan agen sesuai dengan kepentingan terbaik prinsipal. Praktik ini melibatkan penggunaan berbagai metrik kinerja seperti anggaran dan indikator kinerja utama untuk menilai kinerja agen. Selain itu, informasi akuntansi berfungsi sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan antara prinsipal dan agen. Agen menyampaikan laporan keuangan dan informasi akuntansi lainnya sehingga memungkinkan prinsipal untuk membuat keputusan yang tepat dan mengevaluasi tindakan agen. Dengan demikian, informasi akuntansi membantu mengurangi ketidaksimetrisan informasi dan meningkatkan transparansi dalam hubungan prinsipal-agen.

Secara keseluruhan, akuntansi memiliki peran krusial dalam menangani masalah keagenan dengan menyediakan informasi dan alat yang diperlukan untuk memonitor, mengendalikan, dan menyelaraskan kepentingan antara prinsipal dengan agen yang membantu mengurangi ketidaksimetrisan informasi, mengurangi risiko perilaku oportunistik, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang efektif dalam kerangka hubungan prinsipal-agen. Dengan demikian, akuntansi menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam interaksi antara agen dengan prinsipalnya. Permasalahan terkait teori ini dan perpajakan adalah kemungkinan adanya perencanaan pajak dan penghindaran pajak oleh agen. Agen memiliki motivasi untuk terlibat dalam strategi perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengurangi kewajibannya, yang pada gilirannya bisa menimbulkan konflik kepentingan dengan prinsipal.

2.1.2 Teori Sinyal

Menurut Suganda (2018) teori sinyal merupakan ketidakseimbangan informasi antara keunggulan informasi yang dimiliki oleh pihak manajerial dan pemegang saham. Kurangnya informasi bagi publik menyebabkan ketidakseimbangan informasi tersebut, sehingga mereka akan memberikan harga yang relatif lebih murah kepada saham perusahaan. Asimetri informasi dapat diminimalkan dengan pengungkapan informasi sebanyak-banyaknya. Teori sinyal menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan (Ritongga & Setiawati, 2019).

2.1.3 Laporan Keuangan

Menurut Kieso, Weygant & Warfield (2018) laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Tujuan laporan keuangan sesuai pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK (Revisi 2017) yaitu untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Transaksi keuangan adalah segala macam kegiatan yang dapat berdampak pada keuangan perusahaan, seperti penjualan dan pembelian. Bagian akuntansi keuangan di perusahaan akan mengolah data transaksi tersebut, baik secara manual maupun dengan sistem ERP (*enterprise resource planning*) yang sudah biasa mereka gunakan. Laporan keuangan yang paling sering digunakan menurut Kieso, Weygant & Warfield dalam buku *intermediate accounting IFRS edition* sebagai berikut.

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan laba rugi / penghasilan komprehensif
3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas

Tujuan penerapan PSAK No.1 adalah untuk menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum yang selanjutnya disebut laporan keuangan agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2015) nomor satu adalah.

1. Dapat dipahami (*understandability*)

Kualitas informasi yang terdapat pada laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Oleh karena itu, pengguna diasumsikan memiliki pemahaman dasar tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

2. Relevan (*relevance*)

Informasi berguna jika dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka dalam mengembangkan peristiwa masa lalu, sekarang, masa depan (*predictive value*) dan dengan mengkonfirmasi atau mengoreksi harapan yang dibuat sebelumnya (*feedback value*).

3. Keandalan (*reliability*)

Informasi memiliki kualitas andal yang diharapkan tidak mengandung informasi yang salah atau menyesatkan dan dapat diandalkan oleh penggunanya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar.

4. Dapat dibandingkan (*comparability*)

Untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) dalam kondisi dan kinerja keuangan, pengguna dapat membandingkan laporan keuangan lintas periode waktu. Dalam menentukan posisi keuangan relatif, kinerja, dan perubahan status keuangan, pengguna dapat membandingkan laporan keuangan dari perusahaan yang berbeda.

Keluaran (*output*) dari kegiatan bagian akuntansi keuangan tersebut adalah laporan keuangan. Pada perusahaan yang menjalankan aturan pelaporan keuangan, mereka biasa menggunakan tenggat tertentu untuk tersusunnya laporan tersebut, misalnya tanggal lima setiap awal bulan berikutnya. Menurut (Prihadi, 2019) dalam buku Analisis Laporan Keuangan bahwa perusahaan publik, laporan keuangan akan dihasilkan sebanyak empat tahap, yaitu.

1. Laporan kuartal 1
2. Laporan kuartal 2
3. Laporan kuartal 3
4. Laporan akhir tahun.

Laporan kuartal tidak diwajibkan untuk melakukan audit. Perusahaan publik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan kepada pihak berwenang pada akhir setiap bulan. Jika tenggat waktu terlewatkan, perusahaan akan didenda. Laporan akhir tahun diwajibkan

untuk melakukan audit (Prihadi 2019). Auditor berfungsi memastikan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Walaupun demikian, pada dasarnya akuntansi sendiri tidak bebas dari unsur *judgment* dan estimasi. Membaca laporan keuangan diawali dengan berasumsi bahwa laporan yang disajikan oleh auditor dapat diandalkan untuk bahan baku analisis.

2.1.4 Audit

Definisi *auditing* menurut Boynton *et al*, (2002) adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai aseri-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara aseri-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam buku Audit Laporan Keuangan yang ditulis oleh (Ardianingsih, 2021) mengutip tujuan pemeriksaan akuntan menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah untuk menyatakan pendapat kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Audit sangat penting dilakukan karena adanya risiko informasi yaitu kemungkinan informasi yang digunakan untuk menilai risiko bisnis tidak dibuat secara tepat dapat disebabkan sebagai berikut ini.

1. Informasi diterima dari pihak lain.
2. Bias dan motivasi pembuat informasi .
3. Volume data.
4. Kerumitan transaksi.

Efektivitas tindakan yang menjadi rekomendasi umum bagi auditor dalam melakukan audit diukur dengan standar audit (Mulyadi, 2002). Menurut Ardianingsih (2021) dalam buku Audit Laporan Keuangan persyaratan standar audit adalah sebagai berikut.

1. Standar umum
 - a. Audit harus dilakukan oleh satu atau lebih individu dengan pengetahuan teknis dan pelatihan yang cukup sebagai auditor.
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus diperhatikan oleh auditor.
 - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar pekerjaan lapangan
 - a. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika menggunakan asisten, harus disupervisi dengan semestinya.
 - b. Dalam mengatur audit dan memilih jenis pengujian yang akan dilakukan, diperlukan pemahaman yang memadai mengenai pengendalian internal.
 - c. Dalam memberikan opini atas laporan keuangan yang diaudit, bukti audit yang cukup harus diperoleh dengan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi.
 - d. Auditor harus mendokumentasikan hal-hal penting yang menunjukkan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit.
3. Standar pelaporan
 - a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan.

2.1.5 Opini Auditor

Menurut Kariyoto opini audit merupakan sebuah laporan auditor setelah melakukan pemeriksaan audit pada laporan keuangan (Gunawan, 2021). Auditor sebagai pihak

independen dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan akan memberikan pendapat atas kewajaran mengenai laporan keuangan yang diaudit.

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Auditor memberikan pendapat ini setelah menyelesaikan proses audit sesuai dengan standar audit dan tidak menemukan batasan pada ruang lingkup audit. Pendapat wajar mempunyai arti pendapat yang bebas dari ketidakpastian dan ketidakjujuran dan didasarkan pada informasi yang komprehensif. Apabila pesyaratan sebagai berikut terpenuhi, laporan keuangan dianggap menggambarkan posisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- a. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia digunakan untuk menyusun laporan keuangan.
- b. Perubahan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dari periode ke periode telah cukup dijelaskan.
- c. Informasi dalam catatan pendukung telah cukup didefinisikan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan (*Unqualified Opinion Report With Explanatory Language*)

Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menambahkan laporan hasil auditnya dengan bahasa penjelas. Berbagai penyebab adanya bahasa penjelasan yaitu.

- a. Adanya ketidakpastian yang material.
- b. Adanya kekhawatiran atas kelangsungan hidup perusahaan.
- c. Auditor setuju dengan penyimpangan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)

Auditor akan mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian jika salah satu kondisi berikut terpenuhi.

- a. Lingkup audit dibatasi oleh klien.
- b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada di luar kekuasaan klien maupun auditor.
- c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- d. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.

4. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*)

Apabila laporan keuangan klien tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, maka opini auditor akan memberikan opini tidak wajar karena posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan tidak disajikan secara wajar. Selain auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga auditor dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika opini tidak wajar diberikan pada laporan keuangan, maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat diandalkan dan tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

2.1.6 Opini Audit *Going Concern*

Opini audit *going concern* diberikan oleh auditor ketika terdapat keraguan substansial mengenai kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi (Hery, 2017). Opini ini diberikan apabila auditor menemukan indikasi yang menunjukkan bahwa perusahaan mungkin kesulitan mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor akan menilai kondisi perusahaan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, untuk menentukan apakah perusahaan

berisiko mengalami kebangkrutan. Opini *going concern* adalah opini yang dihindari oleh perusahaan karena dapat berdampak buruk pada status *listing* mereka (Noor Hisham Osman *et al.*, 2018). Standar audit 570 mengidentifikasi berbagai peristiwa atau kondisi yang dapat menimbulkan keraguan signifikan tentang kelangsungan usaha

Keuangan:

1. Posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar yang tidak mencukupi
2. Pinjaman dengan jangka waktu pelunasan yang mendekati jatuh tempo tanpa ada prospek pembaruan atau pelunasan yang realistis, atau ketergantungan yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk membiayai aset jangka panjang.
3. Tanda-tanda pengurangan dukungan finansial dari kreditor.
4. Arus kas operasi negatif, yang tercermin dalam laporan keuangan historis atau proyeksi masa depan.
5. Rasio keuangan utama yang buruk.
6. Kerugian operasional yang signifikan atau penurunan drastis dalam nilai aset yang menghasilkan arus kas.
7. Dividen yang belum dibayar atau tidak berkelanjutan.
8. Ketidakmampuan untuk membayar kewajiban kepada kreditor pada saat jatuh tempo.
9. Ketidakmampuan untuk memenuhi syarat-syarat perjanjian pinjaman.
10. Perubahan dalam transaksi dengan pemasok, seperti perubahan dari pembayaran kredit menjadi pembayaran tunai pada saat pengiriman barang.
11. Ketidakmampuan untuk mendapatkan pembiayaan untuk pengembangan produk baru yang penting atau investasi strategis lainnya.

Operasi:

1. Rencana manajemen untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasi perusahaan.
2. Kehilangan manajemen kunci tanpa adanya pengganti yang memadai
3. Kehilangan pasar utama, pelanggan utama, sumber pendapatan, lisensi, atau pemasok kunci.

4. Masalah terkait dengan tenaga kerja.
5. Kekurangan pasokan barang atau bahan.
6. Munculnya pesaing yang sangat kuat.

Lain-lain:

1. Pelanggaran terhadap persyaratan permodalan atau peraturan statutori lainnya.
2. Perselisihan hukum yang dihadapi perusahaan yang, jika dimenangkan, dapat mengakibatkan kewajiban terhadap perusahaan yang kemungkinan besar tidak dapat dipenuhi.
3. Perubahan dalam peraturan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan.
4. Kerusakan aset akibat bencana alam yang tidak diasuransikan atau tidak cukup diasuransikan.

2.1.7 Financial Distress

Kondisi keuangan dalam dunia bisnis menjadi hal yang krusial, karena menyangkut keberlangsungan dari perusahaan itu sendiri. Kondisi keuangan merupakan suatu keadaan secara utuh keuangan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Melalui kondisi keuangan inilah dapat dilihat tingkat kesehatan suatu perusahaan.

Kebangkrutan dapat pula diartikan sebagai kerugian atas kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan (Priyantini, 2015). Kemudian, kerugian tersebut dapat mengakibatkan defisiensi modal yang disebabkan oleh penurunan nilai saldo laba yang dipakai dalam pembayaran dividen dan membuat keseluruhan dari total ekuitas mengalami defisiensi. Apabila hal demikian terus menerus terjadi, total liabilitas perusahaan dapat melampaui total aset. Perusahaan yang mengalami penurunan kondisi keuangan dan mengalami masalah kesulitan keuangan sebelum akhirnya berada pada titik bangkrut atau likuidasi dapat disebut dengan *financial distress*.

Kordestani *et al.* (2011) memaparkan terdapat empat tahap kebangkrutan yang terdiri sebagai berikut.

1. *Latency*. Pada tahap *latency*, akan terjadi penurunan atas *Return on Assets* (ROA). Merupakan sinyal yang buruk bagi manajer jika hal ini terjadi, sehingga manajer diharapkan untuk segera mengatasi hal ini.
2. *Shortage of Cash*. Pada tahap ini, kas perusahaan mengalami keterbatasan dan mungkin kesulitan dalam memenuhi liabilitas. Walaupun demikian, perusahaan setidaknya masih memiliki harapan untuk meningkatkan profitabilitasnya.
3. *Financial Distress*. Pada tahap ini, kesulitan keuangan mulai terjadi dan merupakan *warning sign* bagi perusahaan karena hal ini dianggap sebagai kondisi darurat keuangan. Keadaan ini mendekati kebangkrutan.
4. *Bankruptcy*. Tahap ini merupakan tahap akhir, di mana jika perusahaan telah berada pada tahap ini lambat laun akan mengalami bangkrut atau pailit karena tidak dapat menyelesaikan kesulitan keuangan yang dialaminya.

Kondisi keuangan yang menurun ini merupakan tanda-tanda awal kesulitan keuangan atau *financial distress* bagi suatu perusahaan. Manajer harus dengan cermat mengamati *warning sign* seperti ini agar dapat dengan segera menanggulangi dan mencegah penurunan kondisi keuangan ini hingga ke tahap yang serius karena dapat membahayakan keberlangsungan perusahaan. Menurut Darmansyah (2016), terdapat tiga faktor penyebab kesulitan keuangan pada perusahaan, antara lain:

1. *Neoclassical Model*

Dalam model neo klasikal, kebangkrutan dapat terjadi apabila sumber daya perusahaan dialokasikan secara tidak tepat. Dalam mengestimasi kesulitan keuangan dapat menggunakan data dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.

2. *Financial Model*

Untuk mendeteksi *financial distress*, dapat digunakan perhitungan Batasan likuiditas atau *liquidity constraints*. Maksud dari batasan likuiditas adalah walau perusahaan dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang, namun perusahaan mungkin harus mengalami bangkrut dalam jangka waktu pendek.

3. *Corporate Governance*

Model pada *corporate governance model*, kebangkrutan memiliki kombinasi antara aset dan struktur keuangan yang benar namun tidak dikelola dengan baik. Adanya *inefficiency* atau ketidakefisiensi membuat perusahaan mengalami keadaan *out of the market* yang disebabkan oleh masalah dalam tata kelola perusahaan. Pengestimasi kesulitan dalam model ini dilakukan dengan informasi kepemilikan perusahaan, sebab kepemilikan erat hubungannya dengan struktur tata kelola dan *goodwill* perusahaan.

Terdapat berbagai cara dalam memprediksi tentang penurunan kondisi keuangan, *financial distress*, hingga kebangkrutan yang biasa digunakan. Indikator kinerja keuangan ini dapat diperoleh melalui analisis ratio-ratio keuangan atas informasi yang tersaji pada laporan keuangan perusahaan, misalnya analisis ratio keuangan seperti ratio likuiditas (*liquidity ratio*), ratio *leverage* (*leverage ratio*), ratio cakupan (*coverage ratio*), dan berbagai jenis ratio lainnya. Selain pengukuran menggunakan ratio, juga bisa menggunakan analisis arus kas dengan menggunakan data dari laporan arus kas perusahaan.

Model prediksi kebangkrutan adalah model yang dikembangkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dan kondisi keuangan perusahaan dalam memprediksi apakah perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan dengan penggabungan beberapa ratio keuangan. Model ini banyak dikembangkan oleh para peneliti mengingat kondisi keuangan pada perusahaan merupakan salah satu faktor yang menopang bagi perusahaan dalam menjalankan operasinya (Primasari, 2017).

Model Zmijewski merupakan model prediksi kebangkrutan yang dikembangkan oleh Zmijewski pada tahun 1983. Model ini adalah riset yang telah diulang selama 20 tahun

lamanya. Dalam penelitiannya, Zmijewski (1984), menggunakan beberapa ratio keuangan seperti analisis *return on asset* (ROA), analisis ratio solvabilitas atau *leverage (debt ratio)*, dan ratio likuiditas (*current ratio*) untuk mengukur financial distress pada suatu perusahaan. Model Zmijewski digunakan untuk pertama kalinya pada penelitian yang meneliti 40 perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan 800 perusahaan yang tidak mengalami kebangkrutan. Hasil pengestimasi sampel yang digunakan dalam model ini memiliki tingkat akurasi sebesar 99% (Avenhuis, 2013). Hasil dari pengembangan model oleh Zmijewski yaitu:

$$X = -4,3 - 4,5X_1 + 5,7X_2 - 0,004X_3$$

Ratio keuangan yang digunakan dalam analisis model Zmijewski adalah ratio-ratio keuangan sebagai berikut.

$$X_1 = \text{Net Income} / \text{Total Assets} \text{ (Return on Assets)}$$

$$X_2 = \text{Total Liabilities} / \text{Total Assets} \text{ (Debt Ratio)}$$

$$X_3 = \text{Current Assets} / \text{Current Liabilities} \text{ (Current Ratio)}$$

Perusahaan dianggap memiliki indikasi *distress* dan mengalami penurunan kondisi keuangan apabila probabilitasnya lebih besar dari atau mendekati 0, sehingga nilai *cut-off* dalam model ini yang berlaku adalah 0. Maksud dari hal ini adalah perusahaan yang memiliki nilai X lebih besar atau sama dengan 0 ($X \geq 0$) maupun lebih kecil daripada 0 namun mendekati angka 0, maka diprediksi mengalami kesulitan keuangan. Apabila nilai X lebih kecil dan semakin menjauh daripada 0 ($X < 0$), maka semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

2.1.8 Debt Default

Menurut Ross, Westerfield, dan Jordan (2016), *debt default* adalah situasi dimana debitur gagal membayar kewajiban utangnya pada saat jatuh tempo. *Debt default* dapat terjadi

karena berbagai alasan seperti penurunan pendapatan, peningkatan biaya, atau ketidakmampuan perusahaan untuk mengelola arus kas dengan efektif.

Debt default merujuk pada kondisi di mana perusahaan tidak mampu melunasi pokok utang dan bunganya sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan atau mengalami wanprestasi dalam memenuhi perjanjian utangnya saat jatuh tempo. Pinjaman dari pihak ketiga sering kali diperlukan untuk menunjang aktivitas operasional perusahaan, namun utang yang timbul dari pinjaman tersebut harus dibayarkan kembali sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jika suatu entitas gagal melunasi kewajibannya tepat waktu, maka entitas tersebut dikategorikan mengalami gagal bayar (Widyawati & Nurhayati, 2021). Dalam situasi seperti ini, auditor dapat memberikan opini audit terkait kelangsungan usaha jika perusahaan tidak mampu melunasi utangnya.

Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung mengalami defisit operasional serta penurunan pendapatan dari hasil penjualan. Kondisi ini berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok utang dan beban bunga saat jatuh tempo. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban finansial ini dapat menjadi indikator bagi auditor untuk memberikan opini audit mengenai kelangsungan usaha suatu perusahaan.

Apabila perusahaan tidak dapat membayar utangnya dalam waktu yang telah disepakati, kreditur akan menetapkannya sebagai entitas dengan status gagal bayar. Status ini dapat dicantumkan dalam catatan laporan keuangan pada bagian utang atau dalam laporan auditor independen (Febrianti & Suhartini, 2022).

Menurut Chen & Church dalam Saputri (2019), suatu perusahaan dapat dikategorikan dalam kondisi gagal bayar utang (*debt default*) apabila mengalami salah satu dari kondisi berikut:

1. Perusahaan tidak mampu melunasi utang pokok dan bunganya yang telah jatuh tempo.

2. Perusahaan melanggar ketentuan dalam perjanjian utang (wanprestasi), dengan catatan bahwa pelanggaran tersebut tidak dituntut atau digugat oleh kreditur dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.
3. Perusahaan sedang dalam proses negosiasi untuk merestrukturisasi utang yang telah jatuh tempo.

2.1.9 Audit Delay

Delay dalam audit adalah penundaan laporan auditor yang secara independen memeriksa laporan keuangan klien. Dabies dan Whittred (1980) membagi dua pengertian audit *delay* yaitu jangka waktu yang dibutuhkan selama proses penyajian laporan keuangan dan tempo yang diperlukan dari akhir tahun tutup buku hingga hari penerbitan laporan keuangan yang sudah di tandatangani auditor (Chandra, 2020). Keterlambatan laporan audit diukur dengan menghitung jumlah hari setelah tanggal penutupan buku tahun fiskal pada perusahaan (1 Januari) sampai dengan adanya penandatanganan laporan auditor independen oleh auditor yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit (Abdillah dkk, 2019).

Ketepatan waktu adalah kualitas yang sangat berkaitan dengan ketersediaan informasi pada saat yang dibutuhkan. Waktu antara tanggal pelaporan keuangan dan pelaporan audit itu mencerminkan ketepatan waktu atas penyampaian laporan keuangan. Dyer dan Mc Hug dalam Sebayang (2014:12) bahwa pada umumnya keterlambatan pelaporan keuangan terbagi menjadi tiga kriteria, yaitu.

1. *Preliminary Lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir preliminary oleh bursa.
2. *Auditor's Report Lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani.

3. *Total Lag*: Interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan keuangan dipublikasikan oleh bursa.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdula (1996) dalam Owusu Ansah (2000) semakin lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunannya setelah akhir tahun, semakin besar kemungkinan informasi tersebut bocor ke investor tertentu atau dapat menyebabkan insider trading dan rumor lainnya di bursa saham. Apabila hal ini sering terjadi, maka akan membuat pasar tidak dapat lagi bekerja dengan efektif (Kartika, 2011). Oleh karena itu, regulator harus merancang aturan yang dapat membatasi batas waktu emiten untuk menyerahkan laporan keuangannya. Tujuannya adalah untuk menjaga keakuratan dan relevansi informasi yang dibutuhkan oleh pelaku pasar saham.

Penting bagi perusahaan publik menerbitkan laporan keuangan yang diaudit secara tepat waktu. Di Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom) telah menetapkan jangka waktu maksimum yang diperlukan bagi emiten untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan (SK Bapepom dan LK No. Kep-346/BL/2011). Laporan keuangan tahunan tersebut harus diterbitkan setidaknya satu surat kabar harian Indonesia dengan distribusi nasional. Perusahaan harus mematuhi tenggat waktu peraturan untuk menghindari sanksi administratif dan investor tidak akan membuat pernyataan negatif tentang perusahaan (Anggraeni dan Latrini, 2016).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

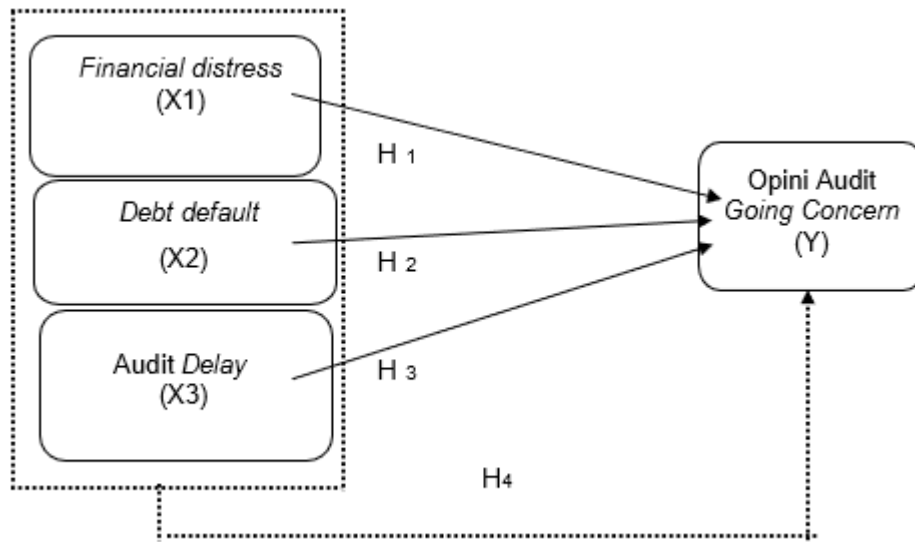
No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yulyvia dan Nurbaiti (2021). Jurnal Akuntansi: Kajian Ilmiah Akuntansi, Vol. 7, no.	Pengaruh Debt default, Disclosure dan Opini Audit tahun Sebelumnya terhadap Penerimaan	Variabel Independent - <i>Debt Default</i> - <i>Disclosure</i> - Opini Audit tahun Sebelumnya	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa debt default, Disclosure, dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan opini audit <i>Going Concern</i> . Kemudian secara parsial <i>Debt default</i> dan <i>Disclosure</i> tidak

	1, pp. 22 – 43	Opini Audit Going concern	Variabel Dependent - Penerimaan Opini Audit <i>Going concern</i>	berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern sedangkan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan opini audit Going Concern.
2.	Ari. T, Indriani.PS, Bambang. LH (2021) Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis Vol. 3 No. 1, pp 449-466	<i>Effect of Debt default, Disclosure, and Financial Distress on the Receiving of Going Concern Audit Opinion</i>	Variabel independen - Debt default - Disclosure - Financial Distress Variabel dependen - Opini Audit <i>Going Concern</i>	Hasilnya menunjukkan bahwa hanya financial distress mempengaruhi pengakuan opini audit Going Concern, sedangkan variabel Seperti Debt default dan Disclosure tidak mempengaruhi penerimaan opini audit Going Concern.
3.	Gregorius dan Laksito (2023). Journal of Applied Managerial Accounting 6(2):173-186	Pengaruh Audit tenure, Reputasi KAP, <i>Audit Delay</i> dan Opini audit tahun sebelumnya Terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i>	Variabel independent – Audit Tenure - Reputasi KAP - <i>Audit Delay</i> -Opini Audit Tahun Sebelumnya Variabel dependent - Opini Audit - Going Concern	Hasil menunjukkan bahwa Audit <i>Delay</i> dan Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap Opini Audit Going Concern. Sedangkan Audit Tenure dan Reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap Opini Audit Going Concern
4.	Ketut Tanti Kustina dan Evin Saputra (2018)	Analisis pengaruh financial distress, debt default, kualitas auditor, auditor client tenure, opinion shopping dan disclosure, terhadap penerimaan opini audit going concern pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek	Variabel Independent - <i>Financial distress</i> - <i>Debt default</i> - Kualitas auditor - <i>Auditor client tenure</i> - <i>Opinion shopping</i> - <i>Disclosure</i> Variabel Dependent - Opini audit <i>going concern</i>	Hasil analisis menunjukkan bahwa debt default berpengaruh positif signifikan terhadap opini audit going concern

		Indonesia 2013-2016.		
5.	Fadhilla Ananda Putri dan Tutut Dewi Astuti (2023)	PENGARUH DEBT DEFAULT DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI	Variabel Independent - Debt Default - Financial Distress Variabel Dependent - Opini audit <i>going concern</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>debt default</i> dan <i>financial distress</i> tidak memiliki pengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i>
6.	A.Salim,Y. Yanti (2021). <i>International Journal of Application of Economics and Business</i> , 2023	FACTORS AFFECTING FINANCIAL DISTRESS IN MANUFACTURING COMPANIES LISTED ON THE IDX	Variabel Independent - Profitabilitas - Likuiditas - <i>Sales growth</i> - <i>Leverage</i> - Ukuran Perusahaan - <i>Operating capacity</i> Variabel Dependent - <i>Financial Distress</i>	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas, likuiditas, ukuran Perusahaan dan kapasitas operasi berpengaruh secara signifikan terhadap <i>financial distress</i> sedangkan ukuran <i>sales growth</i> dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh secara signifikan.
7.	Andri Novius, Sindi Hilwa Faradisa (2024)	Pengaruh Debt Default, Disclosure, Financial Distress, dan Audit Delay terhadap Opini Audit Going Concern (Studi pada Perusahaan Sektor Perdagangan Retail yang Terdaftar di BEI tahun 2020-2022)	Variabel Independent - <i>Debt Default</i> - <i>Financial Distress</i> - <i>Disclosure</i> - <i>Leverage</i> - <i>Audit Delay</i> Variabel Dependent - Opini audit <i>going concern</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Financial distress</i> , <i>Debt Default</i> dan <i>Audit Delay</i> berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i> sedangkan <i>Disclosure</i> tidak berpengaruh secara signifikan
8.	Putri dan Suhartini (2023).	Determinan Penerimaan Opini Audit Going Concern (GCAO)	Variabel Independent - <i>Financial stress</i> - Opini audit tahun sebelumnya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>financial distress</i> berpengaruh secara signifikan sedangkan opini audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i>

			<p>Variabel Moderasi - <i>Opinion shopping</i></p> <p>Variabel dependen - Opini audit <i>going concern</i></p>	
9.	Nauval <i>et al</i> (2022). Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital dan Kewirausahaan.	Pengaruh Kualitas Audit, Debt Ratio, Ukuran Perusahaan, Audit Lag Terhadap Opini Audit Going Concern	<p>Variabel Independen - Opini Audit <i>Going Concern</i></p> <p>Variabel Dependen - Kualitas Audit - Debt Ratio - Ukuran Perusahaan - Audit Lag</p>	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kualitas audit dan Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Opini audit <i>going concern</i> . Sebaliknya, <i>Audit lag</i> dan Debt ratio berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit <i>Going concern</i>
10.	Helen <i>et al</i> (2023). Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia	Determinan Opini Audit Going Concern: Studi Kasus Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi	<p>Variabel Independen : - Opini Audit <i>Going Concern</i></p> <p>Variabel Dependen : - Kualitas Audit - Ukuran Perusahaan - <i>Audit Lag</i> - <i>Financial distress</i> - <i>Debt Ratio</i></p>	Hasil Penelitian menunjukkan <i>debt ratio</i> , ukuran perusahaan, <i>audit lag</i> berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i> . Sedangkan kualitas audit dan <i>financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i> .

2.3 Kerangka Konseptual



Keterangan:

- = Secara parsial menunjukkan pengaruh
- - - - -→ = Secara simultan menunjukkan pengaruh

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh *Financial distress* terhadap Opini Audit *Going Concern*

Menurut teori agensi, kegagalan perusahaan dalam menjalani operasinya untuk menghasilkan laba, ini menunjukkan kegagalan dan kesalahan dari tindakan agen dalam menjalankan bisnisnya, yang berarti menghiraukan kepentingan prinsipal, hal ini berakibat pada ketidak mampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan baik sehingga kelangsungan hidup perusahaan menjadi diragukan. Perusahaan yang mengalami *Financial Distress*, maka kemungkinan menerima opini *Going Concern* juga akan semakin besar. Sehingga semakin kecil rasio keuangan dalam model zmijewski, maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut akan menerima opini audit *Going Concern*.

Pembahasan tersebut sesuai dengan penelitian Putri & Helmayunita (2021) yang menghasilkan *Financial Distress* berpengaruh terhadap pemberian opini *Going Concern*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damanhuri & Putra (2020), yang menjelaskan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap pemberian opini *Going Concern*. Berdasarkan uraian tersebut, maka disusun hipotesis:

H₁: *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*.

2.4.2 Pengaruh *Debt Default* terhadap Opini Audit *Going Concern*

Berdasarkan teori agensi dan teori sinyal *agent* dinilai *principal* melalui pihak auditor sebagai pihak yang di nilai independen untuk mengetahui keadaan perusahaan. Auditor melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan terutama pada kegiatan utang. Apabila perusahaan gagal membayar hutang (*debt default*), hal tersebut dapat menjadi sinyal buruk bagi perusahaan, maka peluang perusahaan menerima opini audit *going concern* akan semakin besar dan investasi pihak luar akan menurun.

Ketika suatu perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi, dana operasional perusahaan cenderung dialokasikan untuk membayar utang tersebut. Kondisi ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas operasional perusahaan. Jika perusahaan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban utangnya, auditor dapat menetapkan status *default* untuk perusahaan tersebut. Dalam hal ini, auditor akan mempertimbangkan status *default* tersebut saat memberikan opini audit mengenai *going concern* perusahaan (Novita, 2018).

Gangguan terhadap kelangsungan operasi perusahaan disebabkan oleh pengalihan aliran kas untuk melunasi utang, sehingga operasional perusahaan menjadi terhambat. Apabila perusahaan tidak mampu membayar pokok atau bunga utangnya tepat waktu (*debt default*), besar kemungkinan perusahaan tersebut akan mendapatkan opini audit *going concern* (Evin dan Ketut, 2018). Kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya ini

dapat memengaruhi keberlangsungan bisnis perusahaan di masa depan, yang pada akhirnya memungkinkan auditor mengeluarkan opini audit *going concern* (Siti, 2010)

.H₂: *Debt Default* berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*.

2.4.3 Pengaruh Audit *Delay* terhadap Opini Audit *Going Concern*

Berdasarkan teori sinyal dan teori agensi, semakin lama audit *delay*, semakin kuat sinyal adanya keraguan auditor terhadap masalah yang dihadapi perusahaan, sehingga memerlukan waktu lebih panjang untuk menyelesaikan proses audit. Ketidakpastian ini dapat menjadi indikasi adanya ancaman terhadap keberlanjutan usaha perusahaan, yang mungkin mendorong auditor untuk memberikan opini audit *going concern*.

Audit *delay* mengacu pada lamanya waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan proses audit dan menyatakan hasilnya dalam laporan audit independen (Priskila Brigita & Harman, 2023). Lamanya proses audit dapat memengaruhi ketepatan waktu penyampaian informasi keuangan perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/PJOK.04/2022, laporan keuangan tahunan harus diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan ke masyarakat paling lambat tiga bulan setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Perusahaan perlu memastikan laporan keuangan auditan diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, karena keterlambatan dapat berdampak pada persepsi nilai perusahaan di mata pemegang saham.

Audit *delay* dapat menjadi indikasi adanya keraguan atau ketidakpastian auditor terhadap kelangsungan usaha perusahaan. Dalam situasi seperti ini, auditor mungkin memerlukan prosedur tambahan untuk memperoleh bukti yang lebih memadai. Kondisi ini tidak hanya memperpanjang waktu audit tetapi juga dapat memengaruhi relevansi informasi laporan keuangan. Apabila terdapat keterlambatan, maka relevansi laporan keuangan untuk pengambilan keputusan dapat berkurang (Myando & Laksito, 2023). Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Audit *delay* berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*.

2.4.4 Pengaruh *Financial Distress, Debt Default, Audit Delay* Terhadap Opini Audit *Going Concern*

Menurut teori sinyal informasi laporan keuangan pada perusahaan mencerminkan nilai perusahaan yang menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya sehingga sinyal positif atau negatif bagi pemangku kepentingan guna mengambil keputusan. Teori sinyal mengasumsikan bahwa entitas yang memiliki informasi yang baik cenderung memberikan informasi tepat waktu kepada pihak pemegang kepentingan. Lama masa pengauditan oleh auditor independen adalah maksimal 90 hari setelah masa tutup buku, tingkat kerumitan dalam proses pengauditan akan menyebabkan terlambatnya penerbitan laporan tahunan perusahaan yang akan berdampak pada pihak pemegang saham dan investor dalam mengambil keputusan terhadap investasinya. Hal tersebut dapat mempengaruhi opini investor dan kreditor atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kondisi perusahaan dapat dilihat dari financial distress yang merupakan kondisi yang menggambarkan kondisi apakah perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga berpotensi menyebabkan default. Jika melihat dari sisi ukuran perusahaan, semakin besar ukuran perusahaan maka akan meningkatkan resiko sehingga berdampak pada penerimaan opini audit *going concern*.

Semakin buruk laporan keuangan perusahaan (mengalami kesulitan keuangan), maka akan besar kemungkinan auditor meragukan keberlangsungan usahanya. Penelitian (Ritonga & Setiawati, 2019) menyatakan financial distress berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*. Kondisi perusahaan yang baik mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk melanjutkan usahanya di masa depan, sehingga kecil kemungkinan auditor memberikan opini audit *going concern*, sebaliknya pada perusahaan yang kondisi keuangannya buruk, mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mengalami ketidakpastian dalam kemampuan menjalankan usahanya di masa depan, maka auditor akan semakin besar kemungkinan untuk memberi opini audit *going concern*.

Perusahaan yang mendapatkan status debt default atau mengalami kegagalan dalam melunasi kewajiban jatuh temponya beserta bunganya, sehingga dapat meningkatkan risiko

adanya keraguan tentang kelangsungan usaha pada perusahaan tersebut sehingga akan meningkatkan penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan tersebut dan sejalan dengan penelitian (Chandra dkk, 2019).

Hasil penelitian (Auladi *et al.*, 2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara audit *delay* terhadap opini audit *going concern*, dengan asumsi bahwa laporan auditor independen yang terlambat mengindikasikan adanya masalah keraguan dalam kelangsungan hidup perusahaan. Dalam penelitiannya (Amami & Triani, 2021) menyatakan bahwa audit *delay* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern* sesuai dengan teori sinyal. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Meinda & Darmayanti, 2022) yang menyatakan bahwa audit *delay* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern* . Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄: *Financial distress, debt default*, dan audit *delay* berpengaruh secara simultan terhadap opini audit *going concern*